

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: Kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Suharto 2004:7). Suharto turut mengemukakan bahwa Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermantra multidimensional (Suharto, 2005:132). Definisi tersebut mengartikan kemiskinan sebagai fenomena yang mencakup berbagai dimensi dan aspek yang kompleks, dilihat dari ruang lingkup kemiskinan yang luas dan membatasi pergerakan masyarakat. Kemiskinan adalah masalah utama yang masih menjadi perhatian Pemerintah. David Cox (dalam Suharto, 2005:132) membagi kemiskinan menjadi beberapa bagian yaitu: Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan sosial, dan kemiskinan konsekuensial. Dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis (Ellis dalam Suharto 2005:133).

Kemiskinan masih menjadi masalah yang berkepanjangan karena belum ditemukan alternatif yang dapat mengentaskan kemiskinan secara efektif, mengingat Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu dengan persentasi 9,36% berdasarkan Berita Resmi Badan Pusat Statistik yang

di keluarkan pada 17 Juli 2023 (BPS; Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023). Data Presentasi Penduduk miskin pada maret 2023 sebesar 9,36% yang mana menurun 0,18% pada maret 2022 dan 0,21% pada september 2022, Berkaitan dengan data kemiskinan di Indonesia, angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang menurun dari angka 7,72% pada tahun 2022 menjadi 6,94 % pada tahun 2023 (BPS Sumedang; 2023). Kecamatan Cisarua merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yang awalnya 4,45% berkurang menjadi 3,65% berdasarkan data perval akhir tahun 2023. Huraerah (2013:6) mengemukakan bahwa permasalahan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah pendapatan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, letak geografis, kondisi lingkungan, akses barang dan jasa, budaya dan politik. Permasalahan kemiskinan tidak hanya menjadi masalah ekonomi namun menjadi masalah kesejahteraan negara karena memberi pengaruh terhadap sektor pembangunan dalam negara yaitu sektor ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kesehatan. Dampak yang diakibatkan oleh masalah kemiskinan membuat Masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan dan memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya merupakan tugas Pemerintah namun merupakan tugas para pemangku kekuasaan kepentingan baik swasta maupun pemerintah, kalangan di bidang usaha dan seluruh masyarakat. Pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan melahirkan beberapa

program kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada Intinya Pemerintah menyelenggarakan program perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi: Program Simpanan Keluarga Sejahtera (dengan Kartu Keluarga Sejahtera), Program Indonesia Sehat (KIP), dan Program Indonesia Pintar (dengan Kartu Indonesia Pintar) (Sitepu 2016:6). Penanggulangan Kemiskinan turut melibatkan Peran serta Kementrian sosial yang mana merupakan Lembaga yang dipercaya oleh Presiden Indonesia untuk ikut andil dalam penanggulangan kemiskinan, hal tersebut ditandai dengan merancang Program Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin (P2FM) (Ditjen Dayasos, 2010). Salah satu program P2FM adalah Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu Program pemberdayaan berbasis kelompok yang beranggotakan 10 orang per kelompok. Program KUBE memberdayakan masyarakat dengan memberikan modal usaha sebagai stimulus untuk membuka usaha secara berkelompok baik usaha barang, makanan, pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan, dan Sesuai dengan Permensos RI Nomor 2 tahun 2019 pasal 1 ayat 2 Tentang Bantuan sosial Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan fakir Miskin yaitu bahwa KUBE adalah Kelompok Keluarga Miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pemberian bantuan UEP

(Usaha ekonomi produktif) kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas disimpulkan bahwa: KUBE merupakan suatu program investasi masa depan yang diharapkan dapat berlanjut dalam jangka waktu yang lama.

Kabupaten Sumedang dalam tujuan penanggulangan kemiskinan turut menggunakan Program KUBE untuk memberdayakan masyarakat menjadi lebih mandiri, dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dan salah satu daerah yang melaksanakan program KUBE yaitu Kecamatan Cisarua. Bentuk Usaha yang dijalankan oleh KUBE di Kecamatan Cisarua yaitu Peternakan, Perkebunan, dan juga Kerajinan. Data Pra-Riset yang ditemukan dalam pelaksanaan Program KUBE yaitu ditemukan masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku KUBE khususnya di bidang usaha perdagangan adalah Keterbatasan dalam pemasaran sehingga mengakibatkan tumbuh Kembang Usaha menjadi terhambat sehingga bisa dikategorikan Usaha yang Mati suri (Farozi, 2020:7), oleh karena itu diperlukan bimbingan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku KUBE, sehingga para pelaku KUBE mampu untuk lebih berinovasi dan mampu membuat gebrakan baru, dengan tujuan agar metode pemasaran yang digunakan

lebih baik yaitu dengan menggunakan *mix marketing* (*online* dan *offline*) dan produk yang dihasilkan tidak monoton dan lebih menarik.

Pelaksanaan program KUBE telah dilaksanakan selama 4 tahun berjalan di Kabupaten Sumedang, dengan jumlah kelompok yang beragam di setiap Kecamatan dan pengadaannya mengacu pada sumber daya manusia dan alam yang ada. Satu kelompok KUBE biasanya terdiri dari 8-10 anggota Kepala keluarga yang terdaftar sebagai di Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Desa tempat tinggal, dan untuk jenis usaha yang dijalankan beragam seperti Pakaian rajutan, Makanan kemasan, sayuran, perikanan, peternakan dan warungan, untuk besaran dana program KUBE sebesar: Rp. 30.000.000/kelompok. Tahapan pelaksanaan program KUBE diawali dengan identifikasi dan seleksi calon penerima manfaat (PM), Pelatihan dan Pembinaan, perencanaan usaha, pendanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan pengembangan usaha. Pelaksanaan program KUBE sangat membantu masyarakat untuk mengakses Sumber daya yang ada misalnya modal usaha, bahan baku, peralatan dan teknologi yang digunakan sebagai penguatan keterampilan dan dijadikan sebagai usaha berkelompok. Usaha kelompok tersebut yang menjadi sumber pendapatan bagi anggota kelompok. Hasil dari penjualan produk yang telah dilakukan oleh kelompok hasilnya akan dibagi dan pembagian tergantung dengan kesepakatan dalam kelompok baik pembagian tiap hari atau tiap minggu. Pelaksanaan Program KUBE menghasilkan banyak

manfaat bagi para penerima manfaat yaitu selain peningkatan pendapatan, akses sumberdaya, penguatan kapasitas, para penerima manfaat juga mendapatkan akses pembuatan nomor induk usaha secara resmi, jika usaha yang dijalankan berhasil. Pelaksanaan program KUBE memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, namun tidak realistis secara langsung apabila program tersebut dapat mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan, mengingat beberapa faktor berikut:

1. Kemiskinan adalah masalah yang multidimensional.

Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional karena mempengaruhi segala dimensi dalam kehidupan (Suharto, 2005:132). Banyak faktor yang mempengaruhi baik itu kurangnya akses pendidikan dan layanan sosial, ketidaksetaraan gender, pengangguran, dan kurangnya akses pekerjaan yang layak. Program KUBE hanya dapat mengatasi sebagian dari faktor-faktor diatas, mengingat sasaran program KUBE merupakan kepala keluarga yang terdaftar sebagai anggota DTKS, dan merupakan fakir miskin desil terendah.

2. Skala tindakan dan dampak.

Program KUBE dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi beberapa kelompok tertentu, namun dalam pengentasan kemiskinan secara menyeluruh membutuhkan tindakan yang melibatkan lebih banyak faktor

dengan skala yang lebih besar, termasuk kebijakan pemerintah, investasi dalam infrastruktur dan perubahan sosial yang mendasar.

3. Perubahan lingkungan eksternal.

Perubahan lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi, namun diluar kendali seperti perubahan ekonomi global, bencana alam dan konflik sosial dapat mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan.

Program KUBE tetap penting dan bermanfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena memberikan akses ke sumber daya dan peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang rentan, oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat dengan strategi yang tepat, kolaborasi yang baik dan dukungan yang berkelanjutan program seperti KUBE dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang luas. Program KUBE dalam pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari hambatan, baik secara internal maupun eksternal yaitu secara internal kurangnya pemantauan terhadap perkembangan usaha, kurangnya rasa saling menghargai dan kepercayaan antar anggota kelompok, kurangnya akses pengetahuan, sedangkan secara eksternal faktor lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan KUBE seperti konflik sosial, bencana alam dan globalisasi. Tanggapan penerima manfaat terkait efektivitas program KUBE cukup bervariasi baik dari implementasi program, dukungan pemerintah, akses pasar dan karakteristik masyarakat setempat. Program KUBE dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

penerima manfaat dan memerlukan perhatian pemerintah akan peningkatan keterampilan, pelatihan, dan akses ke sumber daya yang dibutuhkan. Secara realistis tanggapan para penerima manfaat merupakan jawaban atas pengalaman yang sudah ada baik dalam peningkatan pendapatan, hambatan dalam implementasi program, dan perubahan dalam persepsi dan motivasi. tanggapan para penerima manfaat terhadap efektivitas program KUBE dalam meningkatkan pendapatan tentu cukup efektif mengingat tidak hanya modal usaha yang di dapatkan, namun pelatihan serta akses sumber daya yang dibutuhkan.

Program KUBE pada intinya merupakan salah satu program jangka panjang dengan metode memberdayakan masyarakat melalui stimulasi modal usaha ekonomi produktif secara kelompok perlu dievaluasi efektivitasnya. Richard Steers (2020:45) seorang profesor emeritus dalam bidang manajemen organisasi, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang efisien. Dalam konteks manajemen organisasi, efektivitas sering kali diukur dengan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya dan memberikan nilai tambah yang diharapkan kepada pemangku kepentingan. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk mengukur suatu program, organisasi atau kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk menjawab ke-efektivan program, organisasi dan kegiatan. Efektivitas program adalah Hubungan antara

Output dengan tujuan, dimana kontribusi output berpengaruh terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, semakin besar output yang diberikan maka semakin efektif proses kerja suatu untuk organisasi atau lembaga pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Sutrisno (2010:125-126) mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu program efektif atau tidak dapat dinilai dari unsur-unsur berikut : (1) Pemahaman program, (2) Ketepatan sasaran, (3) Ketepatan waktu, (4) Tercapainya tujuan, dan (5) Perubahan nyata, oleh karena itu program KUBE menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti karena merupakan Salah satu program yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang menjalankan Program KUBE sebagai salah satu alat untuk mengentaskan kemiskinan dengan jumlah program sebanyak 10 KUBE, menelusuri hal tersebut Peneliti berkonsultasi dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang terkait Efektivitas Program KUBE di Kabupaten Sumedang dan dilanjutkan dengan Berkonsultasi dengan Kepala Seksi Pemberdayaan sosial Kecamatan Cisarua terkait efektivitas Program KUBE yang ada di Kecamatan Cisarua. Berangkat dari konsultasi-konsultasi yang telah dilaksanakan Peneliti tertarik untuk meneliti terkait “Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.”

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan utama dalam penelitian ini yaitu: terkait “Bagaimana Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.” Berdasarkan rumusan masalah tersebut, selanjutnya dirinci ke dalam sub-sub rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Cisarua?
2. Bagaimana pemahaman responden terhadap Program KUBE?
3. Bagaimana ketepatan sasaran dan prosedur program KUBE?
4. Bagaimana ketepatan waktu pelaksanaan program KUBE?
5. Bagaimana ketercapaian tujuan program KUBE?
6. Bagaimana perubahan nyata dari program KUBE?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin mendapatkan gambaran secara jelas dan komprehensif tentang bagaimana efektivitas program KUBE di Kecamatan Cisarua yang meliputi;

1. Pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Cisarua
2. Pemahaman penerima manfaat dan pelaksana program terkait Program KUBE
3. Ketepatan sasaran dan prosedur program KUBE
4. Ketepatan waktu pelaksanaan program KUBE

5. Ketercapaian tujuan program KUBE
6. Perubahan nyata yang dialami oleh penerima manfaat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian yang akan datang, yang berhubungan dengan efektivitas program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana dapat dikaji secara lebih mendalam dan berlanjut.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Program KUBE di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka memperbaiki dan menciptakan terobosan baru berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan.

- 2) Bagi Peneliti

Menambah Wawasan dan pengetahuan peneliti, serta sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti dan para peneliti lainnya untuk penelitian yang akan datang di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan Skripsi terdiri atas 5 bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Skripsi.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan tentang efektivitas program, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan tinjauan tentang pekerjaan sosial. Bagian akhir memuat tentang daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka memuat tentang referensi, sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Lampiran memuat tentang alat ukur penelitian dan hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur.

BAB III DESAIN PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang memuat hasil penelitian, analisis masalah, analisis kebutuhan dan identifikasi sumber.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilaksanakan, rencana anggaran biaya,

langkah-langkah pelaksanaan, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

BAB VI, memuat Simpulan dan Saran.